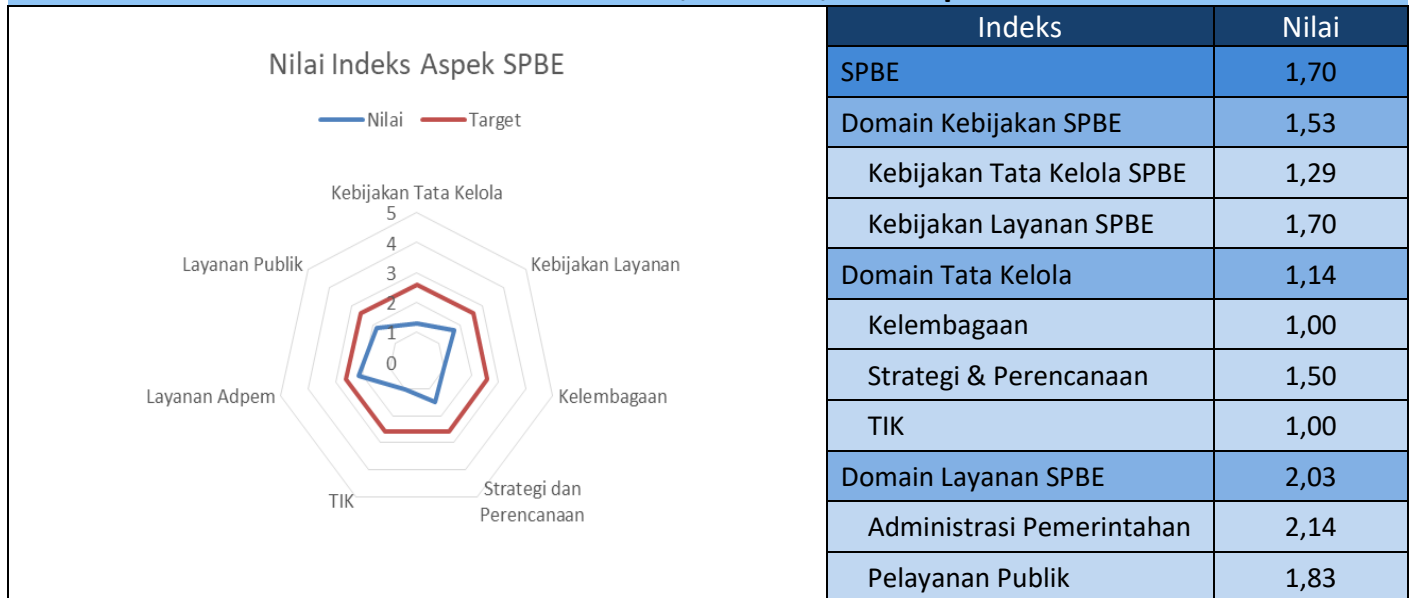


**Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek**



**Kekuatan dan Kelemahan**

**A. Kebijakan Tata kelola**

- **Kekuatan**  
Kebijakan tata kelola SPBE yang telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua perangkat daerah terkait, meskipun belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola adalah kebijakan anggaran dan belanja TIK.
- **Kelemahan**  
Adapun kebijakan yang perlu disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan meliputi kebijakan tim pengarah SPBE, kebijakan inovasi proses bisnis terintegrasi, kebijakan rencana induk SPBE, kebijakan pengoperasian pusat data, kebijakan integrasi sistem aplikasi, dan kebijakan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai. Kebijakan tersebut minimal mengatur standar proses tata kelola bagi semua perangkat daerah terkait, meskipun belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.

**B. Kebijakan Layanan**

- **Kekuatan**  
Kebijakan layanan SPBE yang telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua perangkat daerah terkait, meskipun belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola adalah kebijakan layanan manajemen perencanaan dan penganggaran, dan kebijakan layanan manajemen keuangan. Selain itu, terdapat kebijakan yang mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola tersebut, yaitu kebijakan layanan pengadaan berbasis elektronik.
- **Kelemahan**  
Adapun kebijakan yang perlu disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan meliputi kebijakan layanan naskah dinas, kebijakan layanan manajemen kepegawaian, kebijakan layanan manajemen kinerja, kebijakan layanan pengaduan publik, kebijakan layanan dokumentasi dan informasi hukum, kebijakan layanan whistle blowing system, dan kebijakan layanan publik pemerintah daerah. Kebijakan tersebut minimal mengatur standar proses tata kelola bagi semua perangkat daerah terkait, meskipun belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.

**C. Kelembagaan**

- Kekuatan  
Pemerintah Kabupaten Ponorogo berkomitmen menyusun, menetapkan, dan melaksanakan tata kelola kelembagaan SPBE.
- Kelemahan  
Komitmen penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan tata kelola kelembagaan SPBE diwujudkan melalui perbaikan proses tata kelola tim pengarah SPBE dan inovasi proses kerja terintegrasi. Proses tata kelola tersebut minimal dilaksanakan sepenuhnya sesuai standardisasi oleh semua perangkat daerah terkait.

#### D. Strategi dan Perencanaan

- Kekuatan  
Proses tata kelola yang telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai standardisasi oleh semua perangkat daerah terkait adalah perencanaan SPBE.
- Kelemahan  
Strategi dan perencanaan SPBE yang proses tata kelolanya perlu diperbaiki adalah penganggaran dan pembelanjaan TIK. Proses tata kelola tersebut minimal dilaksanakan sepenuhnya sesuai standardisasi oleh semua perangkat daerah terkait.

#### E. Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Kekuatan  
Pemerintah Kabupaten Ponorogo berkomitmen menyusun, menetapkan, dan melaksanakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.
- Kelemahan  
Teknologi informasi dan komunikasi yang proses tata kelolanya perlu diperbaiki adalah pengoperasian pusat data, integrasi sistem aplikasi, dan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai. Proses tata kelola tersebut minimal dilaksanakan sepenuhnya sesuai standardisasi oleh semua perangkat daerah terkait.

#### F. Administrasi Pemerintahan

- Kekuatan  
Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang telah diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan adalah layanan manajemen penganggaran dan layanan manajemen keuangan. Selain itu, layanan pengadaan secara elektronik telah dikolaborasi dan diintegrasikan secara berjenjang melalui agregasi data dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
- Kelemahan  
Adapun layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang perlu dikembangkan lebih lanjut adalah layanan naskah dinas, layanan manajemen kepegawaian, layanan manajemen perencanaan layanan manajemen kinerja berbasis elektronik (aplikasi). Aplikasi yang dikembangkan tersebut minimal memiliki kapabilitas pertukaran informasi dan layanan. Pengembangan aplikasi mengacu kebijakan pemerintah pusat, baik kementerian/lembaga terkait.

#### G. Pelayanan Publik

- Kekuatan  
Pemerintah Kabupaten Ponorogo berkomitmen mengembangkan layanan publik berbasis elektronik
- Kelemahan  
Adapun layanan publik berbasis elektronik yang perlu dikembangkan lebih lanjut, meliputi aplikasi pengaduan publik, aplikasi dokumentasi dan informasi hukum, aplikasi whistle blowing system, dan aplikasi layanan publik pemerintah daerah lainnya. Aplikasi yang dikembangkan tersebut minimal memiliki kapabilitas pertukaran informasi dan layanan. Pengembangan aplikasi mengacu kebijakan pemerintah pusat, baik kementerian/lembaga terkait.

No	Indikator	Rekomendasi
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE	Kebijakan internal Tim Pengarah SPBE atau Tim Pengarah TIK atau sejenisnya sebaiknya ditetapkan dan memuat pengaturan tugas-tugas yang mendukung penerapan SPBE yang terpadu pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Kebijakan internal proses bisnis sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan tersusunnya proses bisnis yang terintegrasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE	Kebijakan internal rencana induk SPBE sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan tersusunnya rencana induk yang mencakup secara lengkap visi, misi, strategi, sasaran, arsitektur, dan peta rencana SPBE.
4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	Kebijakan internal rencana dan anggaran TIK sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan terkait penyalarsan dengan rencana induk SPBE, pengendalian rencana dan anggaran TIK yang terpadu di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan mendukung penerapan SPBE yang terpadu tidak hanya di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, tetapi juga antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	Kebijakan internal pengoperasian pusat data sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan pengoperasian dan pemanfaatan pusat data bagi semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	Kebijakan internal integrasi sistem aplikasi sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan integrasi sistem aplikasi yang didasarkan pada integrasi proses bisnis antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Kebijakan internal penggunaan aplikasi umum berbagi pakai sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan penggunaannya di semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	Kebijakan internal layanan naskah dinas sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan naskah dinas secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen pegawai secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.
11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.
12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen kinerja secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan sebaiknya dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan-perubahan di internal dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, serta menerapkan manajemen perubahan.
14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan pengaduan publik secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS)	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS) sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan WBS secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
17	Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah	Kebijakan Internal Layanan Publik sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan publik secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	Tim Pengarah SPBE atau Tim Pengarah TIK atau sejenisnya sebaiknya ditetapkan, serta menjalankan tugas dan fungsinya secara menyeluruh sesuai dengan kebijakan internal yang telah ditetapkan.
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Proses bisnis sebaiknya ditetapkan sesuai dengan kebijakan internal, serta diterapkan pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	Rencana induk SPBE sebaiknya ditetapkan secara lengkap mencakup visi, misi, strategi, sasaran, arsitektur, dan peta rencana SPBE sesuai dengan kebijakan internal yang telah ditetapkan.
21	Anggaran dan Belanja Teknologi Informasi Komunikasi	Perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan di unit kerja/perangkat daerah dan sebaiknya seluruhnya dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang berfungsi melaksanakan pengelolaan TIK untuk keterpaduan.
22	Pengoperasian Pusat Data	Prosedur pengoperasian baku untuk pemanfaatan pusat data (data center) sebaiknya ditetapkan, dan dapat diterapkan secara konsisten kepada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
23	Integrasi Sistem Aplikasi	Integrasi sistem aplikasi sebaiknya dilakukan berdasarkan pada arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE.
24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Aplikasi umum sebaiknya diterapkan dan digunakan oleh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah berdasarkan arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE.
25	Layanan Naskah Dinas	Layanan naskah dinas elektronik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada penggunaan naskah dinas elektronik dilaksanakan secara otomatis seperti mengunggah e-dokumen dan memasukkan informasi ke dalam sistem, serta sistem dapat merespon kepada pengguna terhadap mekanisme persetujuan, penyematan tanda tangan digital dan pengiriman naskah dinas elektronik ke tujuan penerima di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
26	Layanan Manajemen Kepegawaian	Layanan manajemen kepegawaian sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada manajemen kepegawaian dilaksanakan secara otomatis seperti tindakan persetujuan dan verifikasi terhadap transaksi kenaikan pangkat, pengajuan cuti, dan sebagainya.

27	Layanan Manajemen Perencanaan	Layanan manajemen perencanaan kegiatan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada manajemen perencanaan kegiatan dilaksanakan secara otomatis seperti tindakan persetujuan, verifikasi, validasi, analitik data perencanaan dan lain sebagainya.
28	Layanan Manajemen Penganggaran	Layanan manajemen penganggaran sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
29	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan manajemen keuangan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
30	Layanan Manajemen Kinerja	Layanan manajemen kinerja sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada manajemen kinerja dilaksanakan secara otomatis seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kinerja organisasi dari atasan dan validasi kinerja.
31	Layanan Pengadaan	Layanan pengadaan yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan penerapan manajemen perubahan.
32	Layanan Pengaduan Publik	Layanan pengaduan publik ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan dokumendasi dan informasi hukum dilaksanakan secara otomatis seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait dokumentasi dan informasi hukum, melakukan pengajuan penambahan informasi dokumentasi hukum baru, proses validasi serta persetujuan dokumentasi informasi hukum baru yang diajukan, dan pencarian informasi hukum berbasis kecerdasan.
34	Layanan Whistle-Blowing System	Layanan whistle blowing system (WBS) sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan pengaduan yang mendukung kerahasiaan pelapor dan menerapkan mekanisme nirsangkal dilaksanakan secara otomatis seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna yang melaporkan pengaduan mengenai transparansi alur proses dan progres penyelesaian dari pengaduan tersebut.
35	Pelayanan Publik 1	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana pengguna dapat dengan mudah mendapatkan layanan dan sistem dapat menjalankan otomatisasi proses bisnis layanan dan menerapkan transaksi layanan ke dalam basis data secara daring (on-line).
36	Aplikasi Pencatatan Sipil	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana pengguna dapat dengan mudah mendapatkan layanan dan sistem dapat menjalankan otomatisasi proses bisnis layanan dan menerapkan transaksi layanan ke dalam basis data secara daring (on-line).
37	Pelayanan Publik 3	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana pengguna dapat dengan mudah mendapatkan layanan dan sistem dapat menjalankan otomatisasi proses bisnis layanan dan menerapkan transaksi layanan ke dalam basis data secara daring (on-line).



## Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	1
2	Kebijakan Internal Inovasi proses bisnis terintegrasi	1
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	1
4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	3
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	1
6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	1
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	1
8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	1
9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	1
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	3
11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	3
12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	1
13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	4
14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	1
15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	1
16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System	1
17	Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah	1
18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	1
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	1
20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	1
21	Anggaran dan Belanja TIK	2
22	Pengoperasian Pusat Data	1
23	Integrasi Sistem Aplikasi	1
24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	1
25	Layanan Naskah Dinas	1
26	Layanan Manajemen Kepegawaian	2
27	Layanan Manajemen Perencanaan	1
28	Layanan Manajemen Penganggaran	3
29	Layanan Manajemen Keuangan	3
30	Layanan Manajemen Kinerja	1
31	Layanan Pengadaan	4
32	Layanan Pengaduan Publik	3
33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	2
34	Layanan <i>Whistle Blowing System</i>	1
35-1	Layanan Publik Instansi Pemerintah 1	2
35-2	Aplikasi Pencatatan Sipil	2
35-3	Layanan Publik Instansi Pemerintah 3	1